

AMERTA

JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Sosialisasi Inovasi Tata Kelola Digital: (E- Government/Smart Governance) di SMK PGRI 4 Kota Serang

¹Abdul Mutholib Saidsy, ²Afiyah Nabilah, ³Lala Tri Maryani,
⁴Rofah, ⁵Heru Wahyudi

^{1,2,3,4,5}Program Studi Administrasi Negara, Universitas Pamulang

E-mail: afiyahnabilah06@gmail.com

ABSTRACT

Digital transformation in educational governance is a strategic step to enhance transparency, efficiency, and school community participation. The concept of Smart Governance, rooted in collaboration and information technology integration, can be adapted within schools to strengthen administrative systems and decision-making processes. This Community Service (PkM) activity was conducted at SMK PGRI 4 Kota Serang with the aim of providing education on the concept and implementation of E-Government/Smart Governance in school governance. The methods included material presentation, interactive discussions, digital governance simulations, the use of visual media, and evaluation through questionnaires. The results indicated an increased understanding among students regarding digital governance concepts, more active participation in discussions, and greater awareness of the importance of digital infrastructure in supporting academic and administrative services. This activity is expected to contribute to expanding the study of E-Government/Smart Governance in the education sector while strengthening digital governance practices in vocational schools, thereby supporting the creation of a more adaptive, transparent, and participatory management system.

Keywords: *digital governance, e-government, smart governance, community service.*

ABSTRAK

Transformasi digital dalam tata kelola pendidikan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi warga sekolah. Konsep *Smart Governance* yang berakar pada prinsip kolaborasi dan integrasi teknologi informasi dapat diadaptasi dalam lingkungan sekolah untuk memperkuat sistem administrasi dan pengambilan keputusan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di SMK PGRI 4 Kota Serang dengan tujuan memberikan edukasi mengenai konsep dan penerapan *E-Government/Smart Governance* dalam tata kelola sekolah. Metode kegiatan meliputi presentasi materi, diskusi interaktif, simulasi tata kelola digital, penggunaan media visual, serta evaluasi melalui kuesioner. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terhadap konsep tata kelola digital, partisipasi diskusi yang lebih aktif, serta kesadaran akan pentingnya infrastruktur digital dalam mendukung layanan akademik dan administrasi. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas kajian *E-Government/Smart Governance* di sektor pendidikan sekaligus memperkuat praktik tata kelola digital di sekolah kejuruan, sehingga mendukung terciptanya sistem manajemen yang lebih adaptif, transparan, dan partisipatif.

Kata kunci: tata kelola digital, e-government, smart governance, pengabdian kepada masyarakat.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan dan organisasi. Masyarakat modern menuntut sistem manajemen yang lebih transparan, efisien, dan partisipatif. Hal ini mendorong lahirnya konsep *E-Government*, yaitu layanan publik berbasis elektronik yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mempercepat proses pengambilan keputusan melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat (Fauzi et al., 2025).

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas kebutuhan masyarakat, konsep *E-Government* berkembang menjadi *Smart Governance*. *Smart Governance* tidak hanya menekankan digitalisasi layanan, tetapi juga mengedepankan kepemimpinan adaptif, integrasi antar pemangku kepentingan, serta pengembangan infrastruktur informasi dan komunikasi yang memadai (Rusdin, 2025). Dengan demikian, *Smart Governance* dipandang sebagai paradigma baru yang mampu menjawab tantangan era masyarakat informasi dengan menekankan keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam konteks pendidikan, *Smart Governance* dapat diadaptasi untuk memperkuat sistem administrasi sekolah dan meningkatkan partisipasi warga sekolah. Menurut Park et al. (2017), indikator integrasi dan kolaborasi tercermin dari keterlibatan guru, siswa, orang tua, dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang memanfaatkan platform digital. Sementara itu, pengembangan infrastruktur informasi dan komunikasi terlihat dari ketersediaan aplikasi, jaringan internet, serta sistem basis data yang digunakan untuk menunjang layanan akademik dan administrasi sekolah.

Upaya menuju tata kelola digital di sekolah sejalan dengan gagasan smart city yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, serta tata kelola yang transparan dan efisien (Wahyuni, 2022). Dengan mengadopsi prinsip *Smart Governance*, sekolah dapat menjadi bagian dari ekosistem kota pintar yang mendukung literasi digital, keterbukaan informasi, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Penerapan prinsip *Smart Governance* di sekolah seperti transparansi, partisipasi, kolaborasi, dan efisiensi diharapkan mampu memperkuat interaksi antar pemangku kepentingan, meningkatkan transparansi informasi, serta menciptakan sistem manajemen yang lebih cepat, akurat, dan partisipatif. Hal ini tidak hanya relevan bagi pengelolaan administrasi sekolah, tetapi juga penting dalam membangun budaya digital yang mendukung pembelajaran dan pengembangan kompetensi siswa.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilaksanakan di SMK PGRI 4 Kota Serang, kegiatan ini dirancang untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada warga sekolah mengenai pentingnya penerapan tata kelola digital berbasis konsep *E-Government/Smart Governance*. Kegiatan ini berfokus pada peningkatan pemahaman siswa, guru, dan tenaga kependidikan tentang bagaimana teknologi informasi dapat digunakan untuk mendukung transparansi, efisiensi, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan di lingkungan sekolah.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, muncul beberapa pertanyaan yang menjadi fokus kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini. Pertama, bagaimana tingkat pemahaman siswa terhadap konsep dan penerapan *E-Government/Smart Governance* dalam tata kelola sekolah? Kedua, apa perbedaan mendasar antara konsep *E-Government* dan *Smart Governance* yang perlu dipahami oleh warga sekolah? Ketiga, mengapa penerapan *E-Government/Smart Governance* dianggap penting dalam dunia pendidikan, khususnya dalam mendukung transparansi, efisiensi, dan partisipasi di lingkungan sekolah kejuruan? bertujuan agar peserta dapat melihat secara langsung bagaimana konsep digitalisasi dan partisipasi diterapkan dalam konteks sekolah.

Tahap terakhir adalah evaluasi, yang dilakukan melalui kuis singkat, refleksi kelompok, serta umpan balik terbuka. Hasil evaluasi digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sekaligus menyusun rekomendasi pengembangan sistem administrasi digital sekolah. Dengan tahapan ini, kegiatan PKM tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga menghasilkan masukan konkret bagi sekolah dalam mengembangkan tata kelola digital yang lebih efektif dan partisipatif.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di SMK PGRI 4 Kota Serang dirancang dengan pendekatan yang berorientasi pada praktik nyata, sehingga peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan pengalaman langsung di sekolah. Tahapan kegiatan dilakukan secara bertahap, dimulai dari sosialisasi materi, diskusi interaktif, simulasi praktik, hingga evaluasi.

Tahap pertama adalah sosialisasi materi, di mana mahasiswa menyampaikan konsep dasar *E-Government* dan *Smart Governance* melalui dialog interaktif. Untuk memudahkan pemahaman, digunakan media visual seperti slide, video, dan infografis. Tahap kedua adalah diskusi interaktif, yang melibatkan siswa/i dalam kelompok kecil untuk menggali pemahaman, pengalaman, dan perspektif mereka terkait tata kelola digital. Diskusi ini mendorong partisipasi aktif sekaligus memperkuat keterhubungan antara teori dan realitas sekolah.

Tahap ketiga adalah simulasi praktik, berupa penerapan sederhana konsep tata kelola digital, seperti: simulasi penggunaan sistem informasi akademik, forum partisipasi siswa, atau model pengambilan keputusan berbasis teknologi. Simulasi ini Melalui diskusi yang terbuka dan partisipatif, siswa/i tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga terlibat langsung dalam proses pembelajaran, sehingga tercipta suasana yang lebih hidup, kolaboratif, dan kontekstual.



Gambar 2.

Mahasiswa tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga membuka ruang bagi siswa/i untuk bertanya, berpendapat, dan berbagi pengalaman sehingga tercipta dialog yang dinamis.

1. Aktivitas Berbasis 7 Cara Pemahaman (Bloom Revisi)

Untuk memperdalam pemahaman siswa/i terhadap konsep *E-Government* dan *Smart Governance*, mahasiswa menggunakan tujuh indikator pemahaman dari Taksonomi Bloom Revisi (Anderson & Krathwohl, 2001). Pendekatan ini menekankan dimensi proses kognitif yang memungkinkan siswa/i tidak hanya mengenal istilah, tetapi juga menghubungkan teori dengan praktik nyata. Berikut kami susun uraian aktivitas berbasis Taksonomi Bloom Revisi dalam bentuk tabel:

Tabel 1. *Aktivitas pengukuran pemahaman siswa/i berbasis Taksonomi Bloom Revisi*

INDIKATOR	AKTIVITAS	TUJUAN	HASIL
Menafsirkan	Siswa/i menuliskan arti <i>E- Government/ Smart Governance</i> dengan bahasa mereka sendiri.	Melatih kemampuan memahami istilah <i>Government/ Smart Governance</i> secara kontekstual.	Siswa mampu menjelaskan definisi dasar dan manfaat tata kelola digital.
Memberikan Contoh	Siswa/i menyebutkan layanan digital yang pernah digunakan misalnya KIP, aplikasi beasiswa.	Menghubungkan konsep abstrak dengan pengalaman nyata.	Siswa/i dapat mengaitkan teori dengan praktik sehari-hari.
Mengklasifikasikan	Diskusi kelompok untuk mengelompokkan layanan digital ke kategori <i>E- Government/ Smart Governance</i> .	Melatih analisis dan membedakan karakteristik konsep.	Siswa/i mampu membedakan layanan administratif digital vs tata kelola kolaboratif.
Meringkas	Siswa/i merangkum bacaan singkat tentang <i>Smart Governance</i> dalam tiga kalimat sederhana.	Menangkap inti gagasan tanpa menghafal teks panjang.	Siswa/i dapat menyusun ringkasan yang jelas dan padat.

Keduanya memiliki orientasi dan cakupan yang berbeda. *E-Government* lebih menekankan pada digitalisasi layanan administrasi untuk meningkatkan efisiensi, sedangkan *Smart Governance* menekankan pada partisipasi, transparansi, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

1. Konsep *E-Government* pada dasarnya berfokus pada digitalisasi layanan publik, yaitu bagaimana pemerintah atau lembaga menyediakan layanan berbasis elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. Sementara itu, *Smart Governance* merupakan paradigma yang lebih luas, mencakup kepemimpinan adaptif, kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta integrasi teknologi informasi dalam proses pengambilan keputusan (Rusdin, 2025).
2. *E-Government* menekankan penggunaan teknologi untuk mempercepat proses administrasi dan pelayanan. Sedangkan *Smart Governance* menekankan partisipasi aktif masyarakat atau warga sekolah dalam tata kelola, sehingga teknologi bukan hanya alat, tetapi juga sarana untuk membangun keterlibatan dan transparansi (Park et al., 2017).
3. Dalam *E-Government*, digitalisasi dilakukan pada sistem tertentu, misalnya layanan administrasi, absensi, atau data akademik. Adapun *Smart Governance* membangun ekosistem kolaboratif yang melibatkan guru, siswa, orang tua, dan masyarakat dalam satu platform digital yang terintegrasi. Hal ini sejalan dengan gagasan *smart city* yang menekankan keterhubungan antar sektor (Wahyuni, 2022).

Di dunia pendidikan, *E-Government* berfokus pada digitalisasi layanan administrasi sekolah. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi dan akurasi melalui pemanfaatan teknologi, misalnya sistem absensi *online*, portal nilai, aplikasi pembayaran, atau pengelolaan data akademik secara terintegrasi. Orientasi utamanya adalah menjadikan proses administrasi lebih cepat, mudah diakses, dan minim kesalahan birokrasi. Dengan kata lain, *E-Government* menekankan pada otomatisasi layanan agar sekolah dapat beroperasi lebih efektif dan efisien.

Sebaliknya, *Smart Governance* memiliki cakupan yang lebih luas. Konsep ini menekankan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan sekolah, siswa, guru, orang tua, dan masyarakat, dalam tata kelola berbasis data, transparansi, dan inovasi. Teknologi tidak hanya dipandang sebagai alat, tetapi sebagai ekosistem yang mendorong partisipasi, akuntabilitas, dan kolaborasi. Contoh penerapannya adalah forum digital untuk ide inovasi siswa, *dashboard* partisipasi guru, atau sistem *feedback* orang tua yang terintegrasi dengan kebijakan sekolah.

Perbedaan antara *E-Government/Smart Governance* tidak hanya dapat dipahami melalui teori, tetapi juga perlu ditunjukkan dalam praktik nyata di lingkungan pendidikan. Hasil kegiatan PkM menunjukkan bahwa siswa lebih mudah memahami perbedaan ini melalui simulasi. Misalnya *E-Government* ditunjukkan dengan aplikasi absensi digital, *Smart Governance* ditunjukkan dengan sistem pengambilan keputusan berbasis musyawarah digital yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dengan cara ini, siswa dapat melihat bahwa *Smart Governance* lebih menekankan kolaborasi dan partisipasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

SMK PGRI 4 Kota Serang merupakan lembaga pendidikan swasta yang berdiri sejak tahun 2010 di Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten. Sekolah ini telah terakreditasi C dan berkomitmen memberikan pendidikan berkualitas dengan sistem pembelajaran lima hari dalam seminggu. Program keahlian yang ditawarkan meliputi Informatika, Teknik Sepeda Motor, dan Administrasi Perkantoran sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Meskipun akses internet belum optimal, sekolah tetap aktif memanfaatkan sumber daya yang ada serta menjalin komunikasi

dengan orang tua siswa. Dengan visi menghasilkan lulusan berkompentensi dan berdaya saing tinggi, SMK PGRI 4 Kota Serang terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui inovasi dan kemitraan strategis.

Dalam rangka memahami efektivitas kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan di SMK PGRI 4 Kota Serang, terdapat beberapa pertanyaan utama yang menjadi fokus analisis. Pertama, bagaimana tingkat pemahaman siswa/i terhadap konsep dan penerapan *E-Government/Smart Governance* dalam tata kelola sekolah, Kedua, apa perbedaan mendasar antara konsep *E-Government* dan *Smart Governance* yang perlu dipahami oleh warga sekolah dan yang ketiga, mengapa penerapan *E-Government/Smart Governance* penting dalam dunia pendidikan.

A. Tingkat Pemahaman Siswa/i Terhadap Konsep dan Penerapan *E-Government/ Smart Governance*

Hasil analisis kegiatan menunjukkan bahwa pemahaman siswa/i SMK PGRI 4 Kota Serang terhadap konsep dan penerapan *E-Government/Smart Governance* dapat ditinjau melalui kerangka Rusdin (2025), yaitu kepemimpinan dan tata kelola, integrasi dan kolaborasi, serta infrastruktur informasi dan komunikasi.

1. Kepemimpinan dan Tata Kelola

Siswa/i masih kesulitan memahami istilah asing (*E-Government/Smart Governance*) karena belum terbiasa dan belum pernah ada sosialisasi dalam konteks tata kelola digital. Diperlukan peran kepemimpinan akademik (mahasiswa/pendidik) yang menuntun siswa dengan bahasa sederhana, contoh nyata, dan simulasi agar konsep tidak terasa abstrak. Hambatan ini menegaskan perlunya pendekatan pembelajaran yang lebih sistematis dan kontekstual agar siswa dapat memahami istilah tersebut dengan baik.

2. Integrasi dan Kolaborasi

Walaupun sekolah memiliki jurusan Administrasi Perkantoran dan Teknik Sepeda Motor yang relevan dengan konsep *E-Government/Smart Governance*, fasilitas sekolah belum sepenuhnya mendukung penerapan digital sehingga pembelajaran inovasi masih terbatas. Oleh karena itu, kegiatan ini menekankan pentingnya integrasi konsep tata kelola digital dengan bidang kejuruan agar siswa dapat melihat relevansi langsung antara teori dan praktik.

3. Infrastruktur Informasi dan Komunikasi

Keterbatasan sarana digital di sekolah membuat siswa belum terbiasa dengan visualisasi data atau simulasi layanan digital. Kegiatan ini perlu menyediakan infografis, diagram alur, dan simulasi sederhana (manual vs digital) agar siswa/i dapat melihat perbedaan secara nyata.

Adapun dalam kegiatan PKM di SMK PGRI 4 Kota Serang, tingkat pemahaman siswa/i terhadap konsep *E-Government/Smart Governance* dapat diukur melalui dua pendekatan utama, yakni: sosialisasi materi & diskusi interaktif, serta aktivitas berbasis tujuh cara pemahaman menurut Taksonomi Bloom Revisi (Anderson & Krathwohl, 2001).

2. Sosialisasi Materi & Diskusi Interaktif



Gambar 1.

Sosialisasi konsep tata kelola digital (E- Government/Smart Governance) dengan contoh sederhana.

E-Government/Smart Governance dengan bahasa sederhana serta analogi yang dekat dengan kehidupan siswa. Misalnya, *E-Government* diibaratkan sebagai “*marketplace* layanan publik” yang memudahkan akses masyarakat, sedangkan *Smart Governance* digambarkan seperti “grup *WhatsApp* RT (Rukun Tetangga),” yang digunakan untuk mengambil keputusan bersama. Pendekatan ini membantu siswa/i memahami istilah asing dengan cara yang lebih kontekstual dan konkret.

Kegiatan sosialisasi dilanjutkan dengan dialog interaktif, di mana siswa/i diajak berdialog untuk menggali pemahaman, pengalaman, serta perspektif mereka terkait tata kelola digital. Proses ini dilakukan dalam kelompok kecil sehingga setiap peserta memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif. **Tabel 2. Perbedaan Konsep E-Government/Smart Governance dalam Dunia Pendidikan**

ASPEK	E-GOVERNMENT	SMART GOVERNANCE
Fokus Utama	Digitalisasi layanan administrasi sekolah (absensi, portal nilai, pembayaran, data akademik).	Tata kelola berbasis partisipasi, transparansi, dan inovasi.
Orientasi	Teknologi sebagai alat untuk mempercepat proses administrasi.	Partisipasi aktif guru, siswa, orang tua, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
Tujuan	Efisiensi, akurasi, dan kemudahan akses layanan sekolah.	Akuntabilitas, keterlibatan, dan kolaborasi dalam tata kelola sekolah.
Cakupan	Sistem tertentu yang terstruktur dan otomatis.	Ekosistem kolaboratif yang terintegrasi antar pemangku kepentingan.
Implementasi	Aplikasi absensi digital, portal nilai <i>online</i> , sistem pembayaran sekolah.	Forum digital ide siswa, <i>dashboard</i> partisipasi guru, sistem <i>feedback</i> orang tua.

4. Pentingnya *E-Government/Smart Governance* dalam Dunia Pendidikan

Digitalisasi di sektor pendidikan merupakan langkah penting dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih cerdas dan responsif. Integrasi teknologi informasi dalam pendidikan, yang dikenal sebagai digitalisasi sekolah dan pendidikan, tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga mendukung transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas pendidikan yang lebih merata. Dalam konteks ini, *E-Government/Smart Governance* memainkan peran kunci sebagai kerangka besar untuk mendukung implementasi teknologi di sektor publik, termasuk di bidang pendidikan.

1. Transparansi Informasi

Penerapan *E-Government/Smart Governance* di sekolah memungkinkan adanya keterbukaan informasi akademik dan administrasi. Misalnya, data nilai, absensi, maupun pengumuman sekolah dapat diakses secara digital oleh siswa, guru, dan orang tua. Transparansi ini memperkuat akuntabilitas sekolah dan mengurangi potensi kesalahpahaman dalam komunikasi.

2. Efisiensi Administrasi

Digitalisasi tata kelola sekolah membantu mempercepat proses administrasi, seperti pendaftaran siswa, pengelolaan data akademik, dan pelaporan kegiatan. Hal ini sejalan dengan prinsip efisiensi yang menjadi salah satu pilar *Smart Governance*. Dengan sistem digital, pekerjaan administrasi yang sebelumnya manual dapat dilakukan lebih cepat, akurat, dan hemat sumber daya.

3. Partisipasi Warga Sekolah

Smart Governance menekankan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan. Dalam konteks pendidikan, hal ini berarti guru, siswa, orang tua, dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui platform digital. Partisipasi ini meningkatkan rasa memiliki terhadap kebijakan sekolah dan memperkuat kolaborasi antar pihak.

4. Literasi Digital dan Kompetensi Siswa

Penerapan tata kelola digital di sekolah juga berfungsi sebagai sarana pembelajaran literasi digital bagi siswa. Dengan terbiasa menggunakan sistem berbasis teknologi, siswa memperoleh keterampilan yang relevan dengan dunia kerja modern. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan kejuruan yang menekankan kesiapan menghadapi era industri 4.0.

5. Keterhubungan dengan Ekosistem *Smart City*

Sekolah yang menerapkan prinsip *Smart Governance* dapat menjadi bagian dari ekosistem *smart city*. Dengan demikian, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai laboratorium penerapan tata kelola digital yang mendukung keterbukaan informasi, kolaborasi, dan inovasi di tingkat lokal.

Penerapan *E-Government/Smart Governance* dalam dunia pendidikan bukan sekadar tren digitalisasi, melainkan kebutuhan strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola sekolah. Kedua konsep ini menghadirkan peluang besar bagi SMK PGRI 4 Kota Serang sebagai sekolah menengah kejuruan, untuk mengintegrasikan efisiensi administrasi dengan partisipasi aktif warga sekolah. Dengan demikian, tata kelola pendidikan tidak hanya berjalan lebih efektif, tetapi juga lebih transparan, inklusif, dan relevan dengan tuntutan era digital.

SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di SMK PGRI 4 Kota Serang menunjukkan bahwa pemahaman siswa mengenai konsep dan penerapan *E-Government* serta *Smart Governance* masih perlu ditingkatkan. Upaya peningkatan ini dapat dilakukan melalui pendekatan partisipatif dan praktik langsung, sehingga siswa tidak hanya mengenal konsep secara teoritis tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sekolah sehari-hari. Perbedaan mendasar antara *E-Government* dan *Smart Governance* dalam konteks pendidikan terletak pada orientasi masing-masing. *E-Government* berfokus pada digitalisasi layanan administrasi untuk meningkatkan efisiensi, sedangkan *Smart Governance* menekankan keterlibatan, transparansi, dan inovasi tata kelola sekolah. Kedua konsep ini saling melengkapi dan dapat menjadi landasan penting bagi pengembangan tata kelola pendidikan yang modern dan inklusif.

Penerapan tata kelola digital sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan partisipasi warga sekolah, sekaligus menyiapkan siswa/i menghadapi tantangan era digital dan masyarakat berbasis pengetahuan. Lingkungan sekolah yang mendukung, fasilitas yang memadai, serta keterlibatan guru dan siswa menjadi faktor penentu keberhasilan penerapan konsep tersebut, sehingga tujuan pendidikan yang optimal dapat tercapai. Dengan demikian, tata kelola digital tidak hanya menjadi sarana teknis, tetapi juga strategi transformasi budaya sekolah menuju pembelajaran yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Sebagai tindak lanjut, disarankan agar kegiatan serupa dapat dikembangkan secara berkelanjutan dengan melibatkan lebih banyak sekolah mitra dan memperluas cakupan materi yang relevan dengan kebutuhan lokal. Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada SMK PGRI 4 Kota Serang beserta Kepala Sekolah, para guru, dan siswa/i yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi inovasi tata kelola digital: (*E-Government/Smart Governance*). Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada dosen pembimbing atas arahan dan bimbingan yang diberikan, serta kepada pihak universitas yang telah memfasilitasi dan mendukung terlaksananya program Pengabdian Kepada Masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ilyasi, A. (2025). *Governansi digital: Transformasi digital dalam administrasi publik*. Widina.
- Fauzi, E. A., & Purnamawati, N. (2025). Definisi konseptual e-government dan e-governance: Analisis komparatif. *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 12(1), 16–22.
- Zein, H. M., & Septiani, S. (2024). *Smart governance: Transformasi digital dalam perencanaan pembangunan daerah*. Sada Kurnia Pustaka.
- Presiden Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional*. Sekretariat Negara.
- Iskandar, A. (2025). Public service innovation in the smart governance era: Strategies to increase transparency and accountability. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(1).
- Mozin, S. Y., Ma'ruf, R., & Kadir, F. (2025). Tipologi, tahapan inovasi dalam pelayanan publik: Pendekatan fokus dan lokus dalam analisis faktor kunci keberhasilan. *Journal of Publicness Studies (JPS)*, 2(2), 15–30. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako. <https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps>
- Makmun, S. (2025). Efektivitas metodologi rapid application development (RAD) dalam pengembangan SIM pendidikan. *Jurnal Keislaman & Pendidikan*, 1(2).
- Media Mahasiswa Indonesia. (2025). *Optimalisasi bimbingan karir berbasis digital untuk meningkatkan kesiapan kerja siswa SMK*. Media Mahasiswa Indonesia.
- Pardo, T. A., Gil-Garcia, J. R., Gascó-Hernández, M., Cook, M. E., & Choi, I. (2021). *Creating public value in cities: A call for focus on context and capability*. In *Smart cities and smart governance: Towards the 22nd century sustainable city* (pp. 119–139). Springer International Publishing.
- Puspita, D., Lestari, A., & Nurfadilah, S. (2024). Transformasi digital dalam lembaga pendidikan: Tantangan dan strategi implementasi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Digital*, 2(2).
- Rusdin, R. B. (2025). Inovasi smart governance di Kota Palu. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(3), 1513–1521.

Sadar. (2023). E-government: Konsep, implementasi, dan evaluasi e- government di Indonesia. Widina Media Utama.

United Nations. (2022). E-government survey 2022: The future of digital government. United Nations Publications.

Wahyuni, S. (2022). Smart governance dan inovasi layanan publik di era digital. Jurnal Ilmu Pemerintahan Modern, 4(1).